

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Pendidikan (*educational policy*) adalah penggabungan dari kata *education* dan *policy*. Kebijakan merupakan seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Carter V. Good (Rusdiana, 2015), memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) bahwa: “*Educational policy judgement, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*”.

Suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersitat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau pelaksanaan yang dilakukan dengan sebuah perencanaan yang telah disusun secara cermat dan terperinci dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Dalam Webster dictionary (Fatih, 2010) dinyatakan bahwa *implementation* berarti *Put rules into actions* (menerapkan aturan ke dalam tindakan) atau *apply theory into practice* (menerapkan teori kedalam praktik). Sedangkan implementasi kebijakan

menurut Andy Al Fatih (Fatih, 2010) adalah penerapan apa yang sudah diamanahkan oleh kebijakan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Riant Nugroho Dwijiwijoto (Fatih, 2010) juga mengatakan implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan bisa mencapai tujuannya.

Terkait dengan kebijakan pendidikan perlu adanya implementasi kebijakan, karena tujuan dari implementasi kebijakan ialah untuk menetapkan arah agar tujuan dari kebijakan itu dapat direalisasikan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 serta diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari rumah dalam masa darurat peneyebaran covid-19 bahwa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah. Perubahan ini merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara *daring*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Sehingga untuk menerapkan pembelajaran secara *daring*, semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran harus memiliki jaringan internet dengan konektivitas yang memadai serta fasilitas

lainnya yang dapat menunjang agar proses pembelajaran secara daring dapat diselenggarakan dengan baik.

Meskipun pembelajaran daring berlangsung dengan baik proses pembelajaran daring ini belum dapat menggantikan proses pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dengan sistem daring dapat dikatakan efektif apabila peserta didik dapat menyerap materi pelajaran dengan efisien, yang berdampak pada hasil belajar siswa yang mampu mencapai kriteria ketuntasan. Dan guru mampu mengelola pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pembelajaran jarak jauh berdampak negatif lebih tinggi khususnya di sekolah yang berada di daerah dengan skala kemiskinan yang tinggi.

Guru dan dunia pendidikan diharapkan mampu memodifikasi pembelajaran dengan model yang kreatif dan inovatif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa pada kondisi pandemi Covid-19 yaitu dengan membuat perencanaan pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran secara daring dan tatap muka atau yang dikenal dengan istilah *blended learning*.

Blended learning merupakan sebuah pembelajaran yang memudahkan dengan mengkombinasikan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran, dan juga kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online.

SMA Negeri 1 Tanjung Pura merupakan salah satu sekolah yang menerapkan model pembelajaran *Blended Learning*. Sebelumnya sekolah ini

melakukan model pembelajaran daring dikarenakan tingginya wabah virus Corona. Setelah wabah ini sedikit membaik maka pihak sekolah memutuskan untuk memakai model pembelajaran *Blended Learning* yang telah direalisasikan mulai dari ajaran baru pada bulan Juni 2021. Peneliti melakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu kepada wakil kepala sekolah dan salah satu guru yang ada di sekolah SMA NEGERI 1 TANJUNG PURA. Dari informasi yang didapat diketahui bahwa sekolah tersebut telah menerapkan model pembelajaran *blended learning* atau lebih dikenal di sekolah dengan istilah pembelajaran kombinasi yaitu penggabungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Dimana pembelajaran tatap muka dilakukan 3 kali dalam seminggu dan daring 3 kali dalam seminggu. Banyak ditemukan ketidaklancaran dalam proses pembelajaran daring. Apalagi disaat ujian-ujian banyak siswa dan siswi yang masih belum memiliki handphone, banyak yang terkendala di jaringan maupun paket. Oleh sebab itu, *blended learning* ini menjadi solusi yang baik bagi permasalahan tersebut. Pembelajaran ini merupakan hasil keputusan bersama yang telah dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah dan orang tua siswa.

Table 1.1. Data Jumlah Siswa, Guru, dan Ruangan di SMA Negeri 1 Tanjung Pura

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Guru PNS	29 Orang
2.	Guru Non PNS	17 Orang
3.	Siswa Kelas X	288 Orang
4.	Siswa Kelas XI	250 Orang
5.	Siswa Kelas XII	232 Orang
6.	Perpustakaan	1 Tempat
7.	Laboratorium Kimia	1 Tempat

8.	Laboratorium Biologi	1 Tempat
9.	Laboratorium Komputer	1 Tempat
10.	Kamar Mandi	4 Tempat
11.	Kantin	2 Tempat
12.	Lapangan Basket	1 Tempat
13.	Lapangan Futsal	1 Tempat
14.	Lapangan Voli	1 Tempat
15.	IPA Kelas X	5 Kelas
16.	IPS Kelas X	3 Kelas
17.	IPA Kelas XI	4 Kelas
18.	IPS Kelas XI	3 Kelas
19.	IPA Kelas XII	4 Kelas
20.	IPS Kelas XII	3 Kelas
21.	Parkir	2 Tempat

Sumber : Olahan Peneliti

Melalui penerapan model pembelajaran *blended learning* ini, guru menilai bahwa siswa akan lebih mudah untuk mempelajari materi secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang telah tersedia secara online, siswa dan guru juga dapat mengadakan diskusi kapanpun dan dimanapun. Guru juga dapat mengadakan ulangan dengan lebih mudah. Selain itu, sumber belajar juga menjadi tidak terbatas. Siswa bukan hanya dapat menguasai materi pembelajaran tetapi siswa juga dapat menguasai teknologi yang didapatkan dari pengalaman belajar dengan model ini. Oleh sebab itu, guru merasa proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi, efektif dan efisien dengan penerapan model pembelajaran *blended learning* ini. Tetapi pada kenyataannya, apa yang diharapkan dalam PJJ ini masih ada yang belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Pendidikan Jarak Jauh ini memiliki tujuan agar mutu pendidikan meningkatkan dan relevansi pendidikan serta meningkatkan pemerataan akses dan

perluasan pendidikan. Tetapi masih terdapat banyak hambatan dalam mencapai tujuan tersebut, baik hambatan internal maupun eksternal

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil observasi peneliti, bahwa adanya ketidak lancarannya dalam pelaksanaan belajar daring yang tidak berjalan dengan maksimal karena adanya peserta didik yang tidak memiliki fasilitas dalam belajar *daring*, kemampuan dalam memahami materi yang diberikan disaat online, dan juga terkendala oleh jaringan dan paket. Dari situasi tersebut, peneliti ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai implementasi model pembelajaran *blended learning* di sekolah menengah atas selama masa pandemi Covid-19. Karena, peneliti merasa model pembelajaran ini tepat digunakan dari pada model pembelajaran *daring* untuk situasi yang sedang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Dan peneliti merasa kebijakan ini memiliki hubungan dengan jurusan peneliti yaitu administrasi publik untuk menambah pengetahuan lebih mendalam, untuk melihat perkembangan penerapan kebijakan tersebut, dan mengetahui sebab akibat serta dampak dari kebijakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Model Pembelajaran Blended Learning Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri 1 Tanjung Pura Kabupaten Langkat.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan pembelajaran *blended learning* pada masa covid-19 di SMA Negeri 1 Tanjung Pura ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan kebijakan belajar secara *blended learning* pada masa pandemic covid 19 di SMA Negeri 1 Tanjung Pura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitiannya yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi sekolah lain yang belum menerapkan model pembelajaran *blended learning*.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca terkait implementasi kebijakan model pembelajaran *blended learning* pada masa pandemi covid-19, serta dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi Peneliti, Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan atau kemampuan tentang implementasi model pembelajaran.

2. Bagi Sekolah, Dapat menambah pengetahuan bagi penulis, guru, siswa dan orang tua. Dan juga diharapkan memberi gambaran kepada sekolah untuk memilih model pembelajaran yang efektif pada masa pandemic Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*). Secara umum, kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor seperti pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan mengarah pada tahap-tahap dibagian pemerintahan untuk mengarahkan kegiatan pengelolaan pemerintahan. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Definisi lain menurut pakar Inggris, W.I. Jenkins (Wahab, 2012) menyatakan kebijakan publik merupakan “*a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian

keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut). Kemudian Tomas R. Dye (Wahab, 2012) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan).

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) (Dr.H.Ahmad Rusdiana, 2015) merupakan penggabungan dari kata *education* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturannya sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Carter V. Good (Dr.H.Ahmad Rusdiana, 2015) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) adalah “*Educational policy judgement, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives.*” (Suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional; pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga; pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuannya yang bersifat melembaga dapat tercapai).

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (Sore & Sobirin, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda, adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda kebijakan publik terdapat keterlibatan *stakeholder* yang sebagaimana dilakukan didasarkan pada tingkat *urgensi* dan esensi kebijakan.
2. Formulasi Kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Adopsi/legitimasi kebijakan, tujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.
4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan, sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Edwards III (Kadji, 2015) mengatakan bahwa: *“The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers.”*

Implementasi kebijakan adalah sebuah tahapan pembuatan keputusan, seperti pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi aspek kehidupannya. Walaupun kebijakan diambil secara tepat, kemungkinan kegagalan juga masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan kebijakan yang sangat handal jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Grindle (Dr.H.Ahmad Rusdiana, 2015), menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu

kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Dr.H.Ahmad Rusdiana, 2015), implementasi kebijakan dimaksudkan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik Nugroho (Kadji, 2015), memberi dua pilihan langkah, yakni mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari dua pilihan tersebut diharapkan kebijakan dapat diimplementasikan, sehingga seharusnya dapat memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, yang dapat memenuhi kepentingan publik.

Sementara Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif atau badan peradilan, dan keputusan tersebut mengenali masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III (Kadji, 2015) yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan : “Pra-kondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil? Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka (Kadji, 2015) memberikan 4 faktor penting yang harus diperhatikan untuk melihat kegagalan dan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Keempat variabel tersebut yaitu:

1. Komunikasi (*communication*), memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Komunikasi berhubungan mengenai proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan apa saja yang dikerjakan dapat berjalan dengan semestinya, pada setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Terdapat 3 indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu:
 - a) Transmisi (*transmission*); sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (*disposisi*) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau penutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (*sumber daya*).

- b) Kejelasan (*Clarity*); tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan harus jelas yang merupakan hal mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang sudah diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Berbagai alasan yang menyebabkan suatu kebijakan dirumuskan dengan jelas. Dalam penelitian ini dilihat dari adanya keragaman saluran komunikasi.
 - c) Konsistensi (*consistency*); implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas juga harus konsisten. Adanya kejelasan/konsistensi dalam penyampaian pesan ataupun perintah. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana.
2. Sumber Daya (*Reseources*), yang diperlukan yaitu :
- Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Dengan kata lain sesuatu dipandang memiliki nilai ekonomi.
- a) Staf yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - b) Informasi yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - c) Kewenangan artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.
 - d) Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan.

Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan.

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Terdapat 3 unsur yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yakni:
 - a. Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman sangat penting bagi aparat pelaksana, karena system nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan system nilai yang memberikan pengaruh terhadap nilai pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.
 - b. Arahan dan tanggapan pelaksana. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan / penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
 - c. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur birokrasi menekankan perlu adanya *Standart Operating Prosedur* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu instansi.

2.2 Pembelajaran Blended Learning

Blended learning adalah suatu kemudahan pembelajaran yang menggabungkan bermacam cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. *Blended learning* juga merupakan kombinasi pengajaran langsung (*face-to-face*) dan pengajaran online, tapi lebih dari itu sebagai elemen dari interaksi sosial.

Menurut Semler (Wijoyo, 2020) , “*blended learning* adalah pembelajaran yang didukung dengan gabungan efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda serta ditemukan pada komunikasi terbuka diantara seluruh bagian yang terlibat dengan pelatihan”. Sedangkan untuk keuntungan dari penggunaan *blended learning* sebuah kombinasi pengajaran langsung (*face to face*) dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial yaitu :

- a. Adanya interaksi antara pengajar dan mahasiswa
- b. Pengajaran bisa secara online atau tatap muka
- c. Blended learning=combining instructional modalities (*or delivery media*)
- d. Blended learning=combining instructional methods.

Terdapat tiga komponen pembelajaran yang terdapat dalam pembelajaran blended learning antara lain :

- a. Online Learning

Menurut Dabbagh (Istiningsih & Hasbullah, 2015) online learning adalah “*Online learning is an open and distributed learning environment that uses*

pedagogical tools, enable by internet and web based technologies, to facilitate learning and knowledge building through meaningful action and interaction.”

(Lingkungan belajar terbuka dengan mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran dan mungkin menggunakan teknologi internet dan berbasis web untuk memfasilitasi proses belajar dan membangun pengetahuan yang berarti).

Online learning merupakan komponen yang memanfaatkan internet sebagai salah satu sumber belajar. *Online learning* menggunakan teknologi Internet, intranet, dan berbasis web dalam mengakses materi pembelajaran dan memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dimanapun dan kapanpun.

b. Pembelajaran Tatap Muka (*Face to Face*)

Pembelajaran tatap muka merupakan bentuk pembelajaran konvensional, yang berupaya untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Pembelajaran tatap muka mempertemukan guru dengan murid dalam satu ruangan untuk belajar.

c. Belajar Mandiri (*Individualized Learning*)

Peserta didik dapat belajar mandiri dengan cara mengakses informasi atau materi pelajaran secara online via Internet. Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri, karena orang kadang seringkali salah arti mengenai belajar mandiri sebagai belajar sendiri. Belajar mandiri berarti belajar secara berinisiatif, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam belajar. Belajar mandiri adalah proses belajar diaman peserta didik memegang kendali atas pengambilan keputusan terhadap kebutuhan belajarnya dengan sedikit memperoleh bantuan dari guru atau instruktur.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edaran No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam masa darurat penyebaran Virus Corona (Covid-19) serta dengan Surat Edaran No 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (covid-19) terdapat prinsip dan tujuan dalam pelaksanaan belajar dari rumah.

Adapun prinsip dalam pelaksanaan belajar dari rumah berdasarkan Surat Edaran No 4 tahun 2020 yaitu:

1. Keselamatan secara lahir dan batin seluruh warga satuan pendidikan dalam pelaksanaan belajar dari rumah.
2. Kegiatan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani dengan tuntutan kurikulum.
3. Belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup dalam masa pandemic.
4. Materi pembelajaran yang bersifat inklusif sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan, budaya, karakter serta jenis kekhususan peserta didik.
5. Aktivitas dan penugasan bervariasi antar daerah, sesuai dengan minat serta kondisi peserta didik masing-masing, termasuk dengan mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas belajar dari rumah.
6. Hasil belajar peserta didik diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa harus memberikan skor kuantitatif.

7. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif oleh guru dan orangtua.

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan Surat Edaran No 15 tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik agar mendapatkan layanan pendidikan selama darurat covid-19.
2. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk covid-19.
3. Mencegah penyebaran dan penularan covid-19 pada lembaga pendidikan.
4. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orangtua/wali.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti agar dapat membandingkan dan sebagai inspirasi dalam penelitian berikutnya. Tinjauan ini digunakan untuk membantu dan menambah pengetahuan peneliti terkait penelitian terdahulu dengan topik pembahasan peneliti serta membantu peneliti dalam menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian dan penulis jadikan acuan dalam penulisan ini, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Indah Suciati (2021) dengan judul “Penerapan Pembelajaran *Blended Learning* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mi Ma’arif Mayak Ponorogo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran blended learning terdiri dari tiga proses yakni perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

(1) Tahap perencanaan pada penerapan pembelajaran *blended learning* di MI Ma'arif Mayak Ponorogo berupa, menentukan aplikasi pembelajaran yang menggunakan WhatsApp dan Google Form, pendataan kondisi dan nomor telepon siswa dengan membuat grup WhatsApp, menyiapkan RPP, menyiapkan bahan materi, menentukan media pembelajaran.

(2) Pada tahap pelaksanaan antara lain: kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup pembelajaran. Kegiatan pendahuluan berupa salam, pembiasaan, dan pengisian absen melalui list nama yang dibuat guru. Kegiatan inti seperti penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Kegiatan dan penutup berisikan kesimpulan dan penugasan.

(3) Pada tahap evaluasi:

a. Berisikan penilaian yang digunakan, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan dilihat dari hasil tugas soal, penilaian keterampilan dilihat dari video praktek yang dikirim pada pendidik.

b. Dampak positif dan dampak negative pembelajaran. Dampak positif seperti guru belajar lebih dalam mengenai teknologi informatika. Dampak negatif seperti kurangnya paham siswa mengenai materi pembelajaran yang diberikan.

Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang pembelajaran *blended learning*. Perbedaannya adalah peneliti pertama tentang penerapan pembelajaran *blended learning* selama masa pandemic covid-19 di Mi Ma'arif Mayak Ponorogo, sedangkan peneliti kedua tentang implementasi kebijakan model pembelajaran

blended learning pada masa pandemic covid-19 di SMA Negeri 1 Gebang dan berfokus pada sumber daya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari (2021), dengan judul “Implementasi Kebijakan belajar dalam Jaringan (daring) pada masa pandemi covid 19 Di SMA Negeri 3 Kota Tanjungbalai”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan belajar dalam jaringan (daring) pada masa pandemi covid-19 di SMA Negeri 3 Kota Tanjungbalai dari Kepatuhan implementor terhadap aturan yang berlaku belum berjalan cukup baik, karena adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya, kemudian pemahaman tugas implementor SMA Negeri 3 Kota Tanjungbalai sudah berjalan dengan baik. Persamaan peneliti ini yaitu mengkaji mengenai imlementasi kebijakan belajar daring di masa Covid-19, menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, fokus penelitian ini yakni memfokuskan pada pembelajaran daring. Dan lokasi penelitian yg berbeda

Ketiga, penelitian oleh Risma Eka Ayu Widyastuti (2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran dengan sistem daring di sekolah tersebut masih ada beberapa hambatan yang mengganggu pembelajaran daring yaitu koneksi internet dan beberapa siswa ada yang belum memiliki handphone untuk belajar daring. Persamaan peneliti ini dengan penelitian mengkaji terkait pembelajaran daring, menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitiannya fokus penelitian ini mengenai efektivitas pembelajaran dengan sistem *daring*.

Table 2.1. Penelitian Terdahulu

1	Dian Indah Suciati	Penerapan Pembelajaran Blended Learning Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mi Ma'arif Mayak Ponorogo Tahun Pelajaran 2020/2021	Mengkaji terkait pembelajaran blended learning dan memakai pendekatan kualitatif.	Fokus penelitian ini yakni penerapan model pembelajaran learning blended masa pandemi. Dan lokasi yang berbeda.	Hasil penelitian bahwa penerapan pembelajaran blended learning meliputi tiga proses yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
2	Risma Eka Ayu Widyastuti	Efektivitas Pembelajaran dgn Sistem Daring pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Jomboran, Klaten di saat Pandemi Covid-19 Tahun Pelajaran 2019/2021	Mengkaji terkait pembelajaran daring. Dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Fokus penelitian ini mengenai efektivitas Pembelajaran dengan Sistem Daring.	Menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran dengan sistem daring di sekolah trsbt masih ada beberapa hambatan yang mengganggu pembelajaran daring yaitu koneksi internet dan beberapa siswa ada yang belum memiliki handphone untuk belajar daring.
3	Indah Lestari	Implementasi Kebijakan belajar dalam Jaringan (daring) pada masa pandemi covid 19 Di SMA Negri 3 Kota Tanjungbalai	Mengkaji mengenai imlementasi kebijakan belajar daring di masa Covid-19 dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Fokus penelitian ini yakni memfokuskan pada pembelajaran daring. Dan lokasi penelitian yang berbeda.	Hasil penelitian ini yaitu Implementasi kebijakan belajar dalam jaringan (daring) pada masa pandemi covid-19 di SMA Negri 3 Kota Tanjungbalai dari kepatuhan implementor terhadap aturan yang berlaku belum berjalan cukup baik, karena adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya, kemudian pemahaman tugas implementor SMA Negri 3 Kota Tanjungbalai sudah berjalan dengan

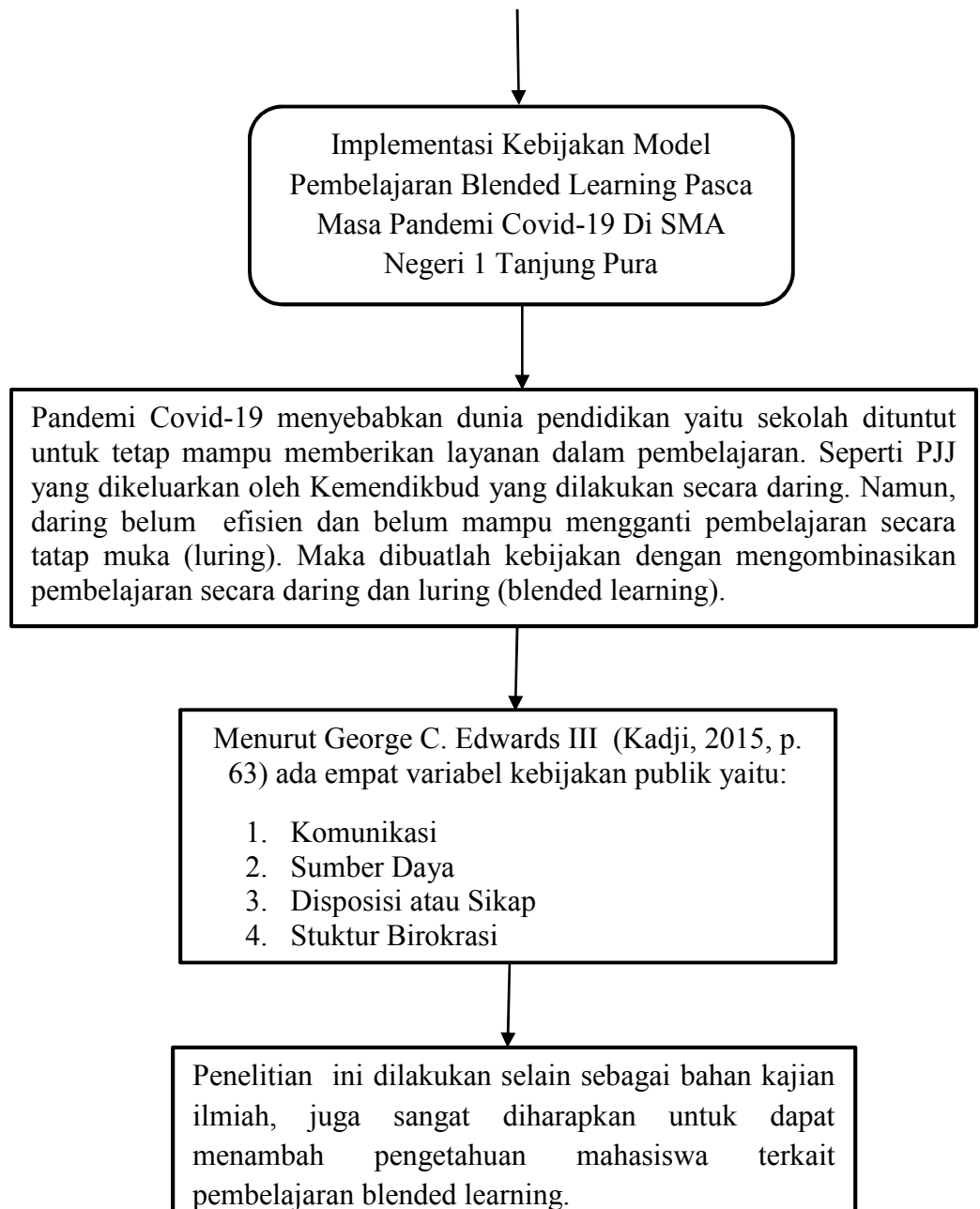
					baik.
--	--	--	--	--	-------

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada hambatan internal dan eksternal yang terjadi di sekolah tersebut dalam pengimplementasian *blended learning* serta bagaimana penerapan kebijakan model pembelajaran *blended learning* di sekolah tersebut. Penelitian ini juga berfokus pada jenjang SMA, dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan belajar *blended learning* di masa pandemi covid-19 serta bagaimana Implementasi kebijakan model pembelajaran *blended learning* pada masa pandemin covid-19 di SMA Negeri 1 Tanjung Pura. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 1 Tanjung Pura yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.52, Pekan Tj. Pura, Kec. Tj. Pura, Kabupaten Langkat. Peneliti menganggap permasalahan dalam rumusan masalah lebih menonjol di lokasi ini serta lokasi ini dekat domisili peneliti sehingga lebih memudahkan peneliti untuk meneliti dan mengamati lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Landasan Konseptual

<p style="text-align: center;">Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Permendikbud Nomor 24 Tahun 20142. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 20203. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2022
--



Dari gambar di atas menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi yaitu tentang implementasi kebijakan model pembelajaran *daring* pada masa pandemi covid-19 di SMA Negeri 1 Tanjung Pura. Kebijakan tersebut terjadi karena dianggap lebih efektif dan cocok digunakan pada masa sekarang ini.

Seperti yang kita ketahui, pandemi covid-19 memberikan banyak dampak pada semua aspek kehidupan salah satunya aspek pendidikan. Hal inilah yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-19 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pembelajaran dilakukan secara online dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi. Namun dengan mempertimbangkan kembali bahwa tidak semua pihak memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan pembelajaran secara online, maka perlu dirancang model pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar dengan mempertimbangan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran *blended learning* yang mengkombinasikan proses pembelajaran tatap muka dan online.

Peneliti menggunakan teori George C. Edwards III yang meliputi empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumber Daya, sikap dan struktur birokrasi. Dalam variabel ini yaitu menggunakan komunikasi yang dilihat dari sosialisasi/informasi, kejelasan informasi, kemudian sumber daya di lihat dari keuangan dan manusianya, selanjutnya disposisi di lihat dari sikap pelaksana serta birokrasi atau organisasinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Moleong, 2021). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana suatu penelitian dilakukan, dan dimana peneliti dapat memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu di SMA Negeri 1 Tanjung Pura yang beralamat di JalanJenderal SudirmanNo. 52, Pekan Tj. Pura, Kec. Tj. Pura, Kabupaten Langkat. Alasan peneliti memilih lokasi SMA Negeri 1 Tanjung Pura dikarenakan peneliti tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan dan ingin mengetahui proses pelaksanaan kebijakan sekolah tersebut dalam menerapkan model pembelajaran blended learning. Dan juga pada observasi awal peneliti melihat dan mendengar dari segi sumber daya seperti ruangan sekolah, handphone, dan laptop yang kurang memadai. Sekolah ini merupakan salah satu yang memiliki akreditasi “A” di kabupaten Langkat. Waktu penelitian ini dimulai dari Juni-Juli 2023.

N O	KEGIATAN	Waktu Penelitian																															
		Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				Septembe r 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																																

2.	Acc Judul																																							
3.	Persetujuan Pembimbing																																							
4.	Bahan Literatur																																							
5.	Penyusunan Proposal																																							
6.	Bimbingan Proposal																																							
7.	Seminar Proposal																																							
8.	Ujian Meja Hijau																																							

Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi atau data terkait masalah dan fokus penelitian dan data yang diteliti sesuai dengan kondisi latar belakang penelitian serta informan tersebut merupakan orang yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan yang baik ialah seseorang yang mampu menangkap, mengerti, dan memenuhi permintaan peneliti, mempunyai kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, menyempatkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat berperan dalam penelitian (Kusumastuti & khoiron, 2019).

Informan adalah orang yang memahami informasi objek penelitian dan dapat memberikan informasi kepada peneliti untuk mendapatkan informasi. Menurut Bagong (Suyanto 2005: 172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Infroman utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun informan penelitian ini adalah :

- A) Informan Kunci : kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah
- B) Informan Utama : Guru dan Siswa
- C) Informan Tambahan : Orang tua dan Akademisi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Patton (Raco, 2010) menyajikan tiga jenis data, yaitu:

3.1.1 Data Primer,

yaitu berupa data-data yang didapatkan dalam penelitian di lapangan, yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari responden melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

- a) Wawancara (*interview*), ialah sebuah cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) yaitu bentuk *interview* yang sudah diarahkan dengan sejumlah pertanyaan secara ketat (Harahap, 2020) Alat yang peneliti gunakan dalam wawancara yaitu berupa catatan dan telepon seluler untuk merekam suara.

3.1.2 Data Sekunder,

yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai alat penunjang dalam

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya serta diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

1. Dokumentasi berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual (Raco, 2010). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data peserta didik, dokumen/foto, juga peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data. Salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman (Harahap, 2020) ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

- a) Reduksi Data, yaitu penyerdehanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
- b) Penyajian Data, yaitu dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi. Peneliti menghubungkan dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data dari dokumentasi guna menghasilkan konsep yang bermakna.
- c) Penarikan Kesimpulan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dan dokumentasi berdasarkan hasil interpretasi data.

